

ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI MUSLIM DI INDONESIA BERDASARKAN POLA PENDAPATAN DAN PENGELUARAN DENGAN PARAMETER NTPRP

Fauzi Arif Lubis¹, Aqwa Naser Daulay², Hendra Harmain³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Aqwa Naser Daulay

E-mail: aqwanaserdaulay@uinsu.ac.id

Abstract

As an agricultural country with a large population and a dominant proportion of households working in agriculture, attention to the welfare of farmers is considered very strategic. However, apart from talking about income that affects welfare, expenditure also affects the level of welfare. Based on this, this study aims to analyze the welfare level of farmers in Indonesia according to income and expenditure patterns using NTPRP parameters. The research method uses a qualitative descriptive approach with the NTPRP parameter (Farmer Household Income Exchange Rate). Based on the findings conducted by researchers in North Sumatra Province, West Sumatra Province, Aceh Province, East Java Province, Central Java Province, West Java Province, Yogyakarta Province, Bali Province. The Farmer Household Income Exchange Rate (NTPRP) for the value of the minimum respondent is at a value of 0.46, this indicates that the total household expenditure of the farmer / respondent is greater than the total household income, it also explains that the farmer / respondent has not been able to meet the needs for agricultural and non-agricultural businesses. Then the maximum Farmer Household Income Exchange Rate (NTPRP) is at a value of 6.71, this indicates that the total household expenditure of the farmer / respondent is smaller than the total household income, it also explains that the farmer / respondent has been able to meet the needs for agricultural and non-agricultural businesses. However, on average, the Farmer Household Income Exchange Rate (NTPRP) is at a value of 1.37, indicating that $NTPRP > 1$ means that on average farmers / respondents are able to meet the needs for agricultural and non-agricultural businesses. This is supported by data from BPS The national NTP in March 2021 was 103.29, meaning that farmers experienced a surplus nationally and in 8 provinces the average value of NTP in July 2021 was 101.71.

Key words: Income; Expenditure; NTPRP

Abstrak

Sebagai Negara agraris dengan jumlah penduduk besar dan proporsi rumah tangga yang bekerja di pertanian dominan, maka perhatian terhadap kesejahteraan petani dinilai sangat strategis. Namun selain berbicara mengenai pendapatan yang mempengaruhi kesejahteraan, pengeluaranpun mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Tingkat Kesejahteraan Petani Di Indonesia Menurut Pola Pendapatan Dan Pengeluaran Menggunakan Parameter NTPRP. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan

parameter NTPRP (Nilai Tukar Pendapatan Rumahtangga Petani). Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan peneliti di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Yogyakarta, Provinsi Bali. Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani (NTPRP) untuk nilai dari responden yang minimum berada pada nilai 0,46, hal tersebut menunjukkan bahwa total pengeluaran rumah tangga petani/ responden tersebut lebih besar dibandingkan dengan total pendapatan rumah tangganya, hal tersebut juga menjelaskan petani/ responden tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan untuk usaha pertanian dan non pertaniannya. Kemudian Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani (NTPRP) yang maksimum berada pada nilai 6,71, hal tersebut menunjukkan bahwa total pengeluaran rumah tangga petani/ responden tersebut lebih kecil dibandingkan dengan total pendapatan rumah tangganya, hal tersebut juga menjelaskan petani/ responden tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan untuk usaha pertanian dan non pertaniannya. Namun secara rata-rata Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani (NTPRP)nya berada pada nilai 1,37, menunjukkan $NTPRP > 1$ berarti secara rata-rata petani/ responden sudah mampu memenuhi kebutuhan untuk usaha pertanian dan non pertaniannya. Hal ini di dukung oleh data dari BPS NTP nasional pada Maret 2021 bernilai 103,29 berarti petani mengalami surplus secara nasional dan pada 8 provinsi nilai rata-rata NTP nya pada juli 2021 yaitu 101,71.

Kata kunci: Pendapatan; Pengeluaran; NTPRP

PENDAHULUAN

Makna Kesejahteraan dalam ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Fenomena kemiskinan di kalangan petani masih ditemukan di beberapa daerah, namun upaya pembangunan pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani telah membawa perbaikan. Rata-rata kepemilikan lahan relatif petani juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani, pendapatan petani menjadi salah satu tolak ukur dalam melihat tingkat kesejahteraan petani yang pada akhirnya menjadi tolak ukur pembangunan pertanian. Peningkatan produktivitas di suatu daerah juga merupakan indikasi dari upaya pembangunan pertanian. Sehingga suatu daerah yang memiliki produktivitas tinggi, kesejahteraan petani harus lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Karena tujuan pembangunan adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam setiap tahapan pembangunan kesejahteraan masyarakat selalu menjadi tujuan utama. Sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk yang besar dan proporsi rumah tangga yang dominan bekerja di bidang pertanian, perhatian terhadap kesejahteraan petani dinilai sangat strategis.

Pada periode 2010-2014, jumlah penduduk miskin di pedesaan atau di sektor pertanian mengalami penurunan sebesar -3,69%/tahun atau menurun

dari sekitar 19,93 juta pada tahun 2010 menjadi 17,14 juta pada tahun 2014. Sedangkan penduduk miskin pada tahun 2010 sebanyak 11,10 juta menurun - 2,25%/tahun menjadi 10,13 juta pada tahun 2014. Karena sebagian besar penduduk pedesaan mencari nafkah di sektor pertanian, maka dapat diartikan bahwa tingkat kemiskinan di sektor pertanian lebih rendah. lebih banyak daripada di sektor lain.

Namun pada tahun 2015-2018 kesejahteraan petani mulai membaik yang terlihat dari perbaikan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) dalam beberapa tahun terakhir. Data BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2014 nilai NTUP (Pertanian Sempit Tanpa Perikanan) hanya sebesar 106,05, namun pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing meningkat menjadi 107,44 dan 109,83. Nilai NTUP pada tahun 2017 juga meningkat lagi menjadi 110,03. Berdasarkan nilai NTUP dapat dipahami bahwa selama empat tahun kesejahteraan petani terus meningkat. Kementerian Pertanian dalam laporan tahunannya menggunakan indikator pendapatan petani sebagai indikator kesejahteraan petani. Pendapatan petani didefinisikan sebagai pendapatan yang diterima oleh setiap petani dalam satu tahun dalam satuan pendapatan per petani per tahun, dan dihitung dengan membagi total Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian sempit dan PDB setiap sub-sektor, dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian. (petani) dan sub-sektornya.

Namun, mayoritas petani di Indonesia yang berjumlah 26 juta rumah tangga, masih hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2016 14 persen penduduk miskin berada di pedesaan, yang sebagian besar mengandalkan sektor pertanian untuk perekonomiannya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman petani dalam pengelolaan keuangan (pendapatan dan pengeluaran) hasil panen dan kepemilikan lahan. Hingga saat ini, petani di Indonesia rata-rata hanya memiliki lahan kurang dari setengah hektar. Terutama para petani di Pulau Jawa. Kondisi ini menyulitkan petani untuk mengolah lahannya sendiri pada tingkat yang menguntungkan. Masalah lainnya adalah sebagian besar petani tidak memiliki keterampilan pertanian yang memadai. Alasannya karena sebagian besar petani memiliki pendidikan yang rendah. Keterbatasan keterampilan, pendapatan rendah dan pendidikan yang tidak memadai membuat petani sulit mengadopsi teknologi pertanian baru.

Hal ini akan mendorong petani untuk mengalihkan pekerjaannya ke sektor lain yang menurut mereka mudah untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya, baik pangan maupun nonpangan. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh ILO pada tahun 1960 menemukan bahwa alasan orang meninggalkan pekerjaan pertanian disebabkan oleh dua masalah utama sebagai faktor utama, yaitu (1) tingkat pendapatan di sektor

pertanian yang sangat rendah dan (2) adanya kesempatan kerja di luar sektor pertanian.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Pendapatan

Konsep penting untuk mendapatkan penghasilan Halal secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan ajaran (Sunnah) Nabi Muhammad (saw), yang menyoroti pentingnya hal ini dalam iman Islam. Pendapatan halal mengacu pada pendapatan atau keuntungan yang diperoleh melalui metode yang dapat diterima dan diperbolehkan menurut hukum Islam, menekankan pentingnya mematuhi standar moral dan etika dalam transaksi keuangan (Halal Time, 2022).

2. Pengeluaran Konsumsi

Konsumsi perspektif dalam Islam dan perspektif konsumsi di era modern. Dalam Islam Dalam konsep konsumsi terdapat lima prinsip yaitu keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Sehingga etika konsumsi sesuai Al-Qur'an harus memberikan dampak positif bagi kehidupan kita sendiri tetapi juga bermanfaat bagi orang lain (Tarigan, 2019).

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Allah SWT telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Hud ayat 6:

Artinya: Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan

akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah) (Chapra, 2001).

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan sumber kepustakaan, dalam hal ini data primer atau sekunder. Kemudian dikumpulkan, sumber-sumber perpustakaan dikelompokkan sesuai pertanyaan. Setelah melakukan hal tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data dari sumber-sumber perpustakaan.

Peneliti juga menerapkan penelitian lapangan. Pada awal pelaksanaan dilakukan rancangan penelitian yang akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian lapangan. langkah selanjutnya, peneliti melakukan pengujian terhadap instrumen yang akan digunakan dalam penelitian lapangan. Kemudian peneliti memilih tempat penelitian. Di lokasi penelitian, peneliti mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.

Data dari studi kepustakaan dan hasil penelitian lapangan disajikan sebagai temuan penelitian. Data yang telah ditampilkan kemudian diabstraksikan yang bertujuan untuk menampilkan fakta. Kemudian fakta-fakta tersebut diinterpretasikan untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan.

Sebagai ukuran tingkat kesejahteraan rumah tangga petani, didekati konsep Nilai Tukar Petani (NTP), yaitu rasio indeks harga yang diterima dan indeks harga yang dibayar petani. Menurut Simatupang, hampir tidak ada penanda kesejahteraan yang unik bagi rumah tangga petani, sehingga NTP menjadi satu-satunya pilihan bagi pemerhati pembangunan pertanian. Namun, NTP hanya mengacu pada tanaman pangan rumah tangga dan petani perkebunan. Sementara itu, rumah tangga petani pangan dan perkebunan pada umumnya juga memperoleh pendapatan dari usaha peternakan atau perikanan bahkan dari sumber non pertanian.

1. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif, kemudian peneliti juga menerapkan field research. Pada awal pelaksanaan dilakukan desain penelitian yang akan dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan field research. langkah selanjutnya peneliti melaksanakan pengujian instrumen yang akan dipakai pada field research. Kemudian, peneliti memilih tempat penelitian. Pada tempat penelitian peneliti melakukan penghimpunan data melalui pengamatan, dokumentasi dan wawancara kepada petani dengan menggunakan angket yang sudah dipersiapkan.

Data hasil library study dan hasil field research ditampilkan sebagai temuan penelitian. Data yang telah ditampilkan kemudian diabstraksikan yang bertujuan untuk menampilkan fakta. Lalu, fakta tersebut diinterpretasi untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2. Lingkup Bahasan

Secara umum pengeluaran rumah tangga berupa kebutuhan makanan dan bukan makanan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, jika tingkat pendapatan rendah maka kebutuhan konsumsi makanan terlebih dahulu meningkat dibandingkan non makanan, namun seiring dengan peningkatan pendapatan, proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan akan berkurang dan kebutuhan non-makanan akan meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka akan diukur tingkat kesejahteraan masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan pangan saja atau keduanya, yaitu petani dapat memenuhi kebutuhan pangan dan non pangannya dari berbagai sumber pendapatan. Tingkat kesejahteraan rumah tangga petani dapat diukur dengan menggunakan pendekatan dengan menggunakan konsep Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani (NTPRP) yang merupakan perbandingan antara indeks harga yang diperoleh dengan indeks harga yang dikeluarkan oleh petani.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kemudian penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Pada awal pelaksanaan dilakukan rancangan penelitian yang akan digunakan sebagai

pedoman dalam melakukan penelitian lapangan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan petani di Indonesia menurut pola pendapatan dan pengeluaran dengan menggunakan parameter NTPRP. langkah selanjutnya, peneliti melakukan pengujian terhadap instrumen yang akan digunakan dalam penelitian lapangan. Kemudian peneliti memilih lokasi penelitian yaitu 8 provinsi di Indonesia yang dilaksanakan pada bulan Agustus-oktober 2021. Di lokasi penelitian, peneliti mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Ada 8 provinsi yang menjadi objek penelitian ini yaitu:

- a. Provinsi Sumatera Utara
- b. Provinsi Sumatera Barat
- c. Provinsi Aceh
- d. Provinsi Jawa Timur
- e. Provinsi Jawa Tengah
- f. Provinsi Jawa Barat
- g. Provinsi Yogyakarta
- h. Provinsi Bali

4. Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan sumber kepustakaan, dalam hal ini data primer atau sekunder. Kemudian dikumpulkan, sumber-sumber perpustakaan dikelompokkan sesuai pertanyaan. Setelah melakukan hal tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data dari sumber-sumber perpustakaan.

Peneliti juga menerapkan penelitian lapangan. Pada awal pelaksanaan dilakukan rancangan penelitian yang akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian lapangan. langkah selanjutnya, peneliti melakukan pengujian terhadap instrumen yang akan digunakan dalam penelitian lapangan. Kemudian peneliti memilih tempat penelitian. Di lokasi penelitian, peneliti mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.

Penelitian dilakukan melalui pengumpulan sumber kepustakaan yang terutama berasal dari hasil wawancara, observasi, jurnal, modul atau artikel serta website BPS, dalam hal ini dapat berupa data primer maupun data sekunder. Kemudian dikumpulkan, sumber kepustakaan dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan penelitian dan sebagian data dijadikan jawaban atau hasil dalam penelitian ini. Setelah penetapan dilakukan, peneliti melakukan pengumpulan data dari sumber perpustakaan.

5. Analisis Data

Sebagai ukuran tingkat kesejahteraan rumah tangga petani, didekati konsep Nilai Tukar Petani (NTP), yaitu rasio indeks harga yang diterima dan indeks harga yang dibayar petani. Menurut Simatupang, hampir tidak ada penanda kesejahteraan yang unik bagi rumah tangga petani, sehingga NTP menjadi satu-satunya pilihan bagi pemerhati pembangunan pertanian. Namun, NTP hanya mengacu pada tanaman pangan rumah tangga dan petani perkebunan. Sementara itu, rumah tangga petani pangan dan perkebunan pada umumnya juga memperoleh pendapatan dari usaha peternakan atau perikanan bahkan dari sumber non pertanian.

Secara matematis konsep Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NTPRP} &= Y/E \\ Y &= Y_p + \text{YNP} \\ E &= E_p + \text{EK} \end{aligned}$$

Dimana :

$$\begin{aligned} \text{NTPRP} &= \text{Rural Household Income Exchange Rate} \\ Y &= \text{Income} \\ E &= \text{Expenditure} \\ Y_p &= \text{Total income from agriculture} \\ \text{YNP} &= \text{Total Income from non-agricultural business} \\ E_p &= \text{Total expenditure for farming business} \\ \text{EK} &= \text{Total expenditure for non-agricultural business} \end{aligned}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Luas Panen dan Produksi Padi

Menurut BPS, luas panen yang berhasil (harvest area) adalah tanaman yang dipanen setelah tanaman cukup umur. Panen yang berhasil ini termasuk tanaman yang hasil panennya hanya bisa dipanen (minimal sampai 11%) yang mungkin disebabkan oleh serangan organisme pengganggu tanaman atau bencana alam. Sedangkan area produksi merupakan ukuran berapa dan berapa banyak barang yang dihasilkan suatu perusahaan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Luas panen dan produksi padi tahun 2020 di beberapa provinsi di Indonesia adalah:

Tabel 1. Luas Area dan Produksi Beras di beberapa Provinsi di Indonesia Tahun 2020

No	Provinsi	Luas Area (Ha)	Produksi Beras (Tons)
1	Aceh	317 869,41	1 757 313,07
2	Sumatera Utara	388 591,22	2 040 500,19

3	Sumatera Barat	295 664,47	1 387 269,29
4	Yogyakarta	110 548,12	523 395,95
5	Jawa Tengah	1 666 931,49	9 489 164,62
6	Jawa Barat	1 586 888,63	9 016 772,58
7	Bali	90 980,69	532 168,45
8	Jawa Timur	1 754 380,30	9 944 538,26

Source: BPS

Berdasarkan data di atas, luas lahan padi di antara delapan provinsi di Indonesia pada tahun 2020 terluas berada di Provinsi Jawa Timur dengan tingkat produksi tertinggi, sedangkan luas panen padi tersempit terdapat di Provinsi DI Yogyakarta dengan tingkat produksi terendah. Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa luas panen padi mempengaruhi tingkat produksi padi. Potensi luas panen padi di Indonesia pada subround Januari-April 2021 mencapai 4,86 juta hektar atau meningkat sekitar 1,02 juta hektar (26,53 persen) dibandingkan subround Januari-April 2020 yang sebesar 3,84 juta hektar. Sementara itu, potensi produksi untuk periode Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras, meningkat 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan produksi beras pada subround yang sama tahun lalu sebesar 11,46 juta ton. Pencapaian peningkatan produksi beras pada tahun 2021 merupakan hasil dari strategi dalam mewujudkan komitmen untuk membangun ketahanan pangan nasional, namun dapat mengalami penurunan karena beberapa faktor yang dapat memicunya, seperti alih fungsi lahan atau perubahan preferensi komoditas, atau karena beberapa subsidi terkait dengan akuisisi harga. pupuk dan benih padi yang dipotong atau dibuang akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2021.

2. Karakteristik Responden

a. Jumlah Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para petani yang berada di 9 kabupaten/ kota di Indonesia. Tingkat pengembalian daftar pertanyaan dari peneliti beserta jawaban ini tinggi dikarenakan peneliti mendistribusikan secara langsung bertanya dan menunggu jawaban dari responden secara langsung. Kuesioner yang disebarkan kepada responden adalah sebanyak 40 rangkap sesuai dengan jumlah responden dalam penelitian ini, adapun tingkat pengembalian daftar pertanyaan/ kuesioner beserta jawaban dalam penelitian ini adalah 100%, karena peneliti atau asisten peneliti menunggu langsung responden menjawab daftar pertanyaan penelitian. Adapun rincian jumlah responden di setiap kota/ kabupaten, yaitu:

Tabel 2. Jumlah Responden

Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani Muslim Di Indonesia Berdasarkan Pola Pendapatan Dan Pengeluaran Dengan Parameter NTPRP

No	Kabupaten/ Kota	Nama Kelompok Tani	Jumlah Responden
1	Banda Aceh	Jroh Naguna Gampong Pango Deah	4
2	Penyabungan	Satahi	4
3	Deli Serdang	Palu Naga	6
4	Padang	Lembuti II	4
5	Bandung	Lestari	4
6	Semarang	Sido Makmur dan Tani Makmur	4
7	Yogyakarta	Maju Makmur	6
8	Bali	Subak Timbul	4
9	Surabaya	Melati	4
Total			40

Sumber: Data diolah

Jumlah responden di atas ditentukan berdasarkan kelompok tani yang ada di Kabupaten/ kota tersebut, hal itu dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih baik dan valid mengenai keadaan petani di daerah tersebut.

b. Umur dan Lama Pengalaman Bertani

Berdasarkan hasil penelitian umur petani, mayoritas responden berumur berkisar antara 40-60 tahun yaitu sebanyak 60% dari jumlah keseluruhan responden, kemudian berumur >61 tahun sebanyak 25% dari jumlah keseluruhan responden, dan 15% diumur 20-40 tahun. Berdasarkan data deskriptif yang diperoleh peneliti dan hasil wawancara dengan beberapa kelompok tani dapat disimpulkan bahwa terjadi perlambatan atau stagnasi pad regenerasi petani dari kalangan muda, oleh sebab itu perlu adanya program pemerintah yang bisa mendorong generasi muda untuk tertarik mengambil profesi petani, misalnya melalui program petani millennial, hal itu perlu dikarenakan sebagaimana disampaikan oleh bung karno bahwa petini merupakan kepanjangan dari Penjaga Tatanan Negara Indonesia. adapun Kategori umur petani responden dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3. Jumlah Responden Menurut Kelompok Umur

Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
20-40	6	15
40-60	24	60
> 61	10	25
Total	40	100

Sumber: Data diolah

Adapun lama pengalaman bertani berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti mayoritas petani yang dijadikan responden oleh peneliti sudah

berpengalamn lebih dari 15 tahun, sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. Jumlah Responden Menurut Lama Pengalaman Bertani

Lama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
< 5 Tahun	-	-
6 - 10 Tahun	-	-
11 - 15 Tahun	12	30%
> 15 Tahun	28	70%
Total	40	100

Sumber: Data diolah

c. Tingkat Pendidikan, Pekerjaan Sampingan dan Jumlah Tanggungan Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian tingkat pendidikan petani, mayoritas tingkat pendidikan responden pada tingkatan SLTA/ SMA, sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat didikan	Pen	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
SD		12	30
SMP		6	15
SMA		21	52,5
Pendidikan Tinggi		1	2,5
Total		40	100

Sumber: Data diolah

Kemudian beberapa pekerjaan sampingan petani selain bertani yaitu berprofesi sebagai buruh bangunan, ojek, pedagang, bertani non padi, berternak, buruh pabrik, hal tersebut dilakukan guna menambah pendapatan dan mengisi waku ketika masa setelah panen atau pada saat waktu antara panen dengan masa tanam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti jumlah tanggungan keluarga bagi petani yang menjadi responden penelitian berjumlah antara 1-6 orang.

d. Luas Kepemilikan Lahan dan Modal dalam Bertani

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan luas lahan petani yang menjadi responden dalam penelitian ini bervariasi seperti data pada tabel dibawah ini, menunjukkan rata-rata lahannya seluas 0,6 sampai lebih dari 1 Ha, seabaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Luas Lahan Responden

No	Luas Lahan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	< 0,1 Ha	8	20

2	0,1 - 0,5 Ha	5	12,5
3	0,6 - 1 Ha	13	32,5
4	>1 Ha	14	35
Jumlah		40	100

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan asal modal bertani responden berasal dari modal sendiri sebanyak 65% responden, sisanya bersumber dari kelompok tani sebesar 25% dan pinjaman sebesar 10%. Modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting keberadaannya dalam usaha tani. Keterbatasan modal masih menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh rumah tangga petani dan kebutuhan modal usaha tani akan semakin meningkat seiring meningkatnya harga input seperti benih, pupuk, obat-obatan dan upah tenaga kerja. Namun berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan responden, rata-rata dari mereka merasa enggan/ takut untuk meminjam dikarena bunga yang terlalu tinggi sehingga mereka merasa tidak mungkin sanggup untuk mengembalikannya, oleh sebab itu ketika modal sendiri terasa tidak cukup untuk usaha tani mereka akan mencoba bentuk usaha yang lain.

Tabel 7. Asal Modal dalam Bertani Responden

No	Asal Modal dalam Bertani	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Modal Sendiri	26	65
2	Pinjaman	4	10
3	Kelompok Tani	10	25
4	Lainnya	-	-
Jumlah		40	100

Sumber: Data diolah

3. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani

Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga.

Rumah tangga memperoleh pendapatan mereka dari tiga sumber utama, diantaranya:

a. Upah atau gaji

Upah yang didapat oleh seseorang merupakan total penerimaan atau hasil yang diberikan oleh suatu perusahaan atas prestasi kerjanya. Penerimaan yang didapat diberikan sesuai dengan kesepakatan (akad), artinya pendapatan yang diterima bisa diberikan harian, mingguan, ataupun bulanan. Terutama untuk pemberian gaji bulanan, para pelaku rumah tangga harus bisa memaksimalkan jumlah penghasilan yang diberikan oleh suami mereka agar tercukupinya kebutuhan keluarga untuk beberapa waktu kedepan.

b. Pendapatan dari kekayaan

Tidak sedikit kekayaan yang besar saat ini diwarisi dari generasi terdahulu dan biasanya kekayaan semacam ini berasal dari warisan yang diperoleh dari orang tua yang memiliki harta lebih yang diwariskan kepada keturunannya agar bisa dijaga dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kekayaan seperti ini tidak hanya berupa uang saja, melainkan dapat berupa lahan kosong seperti sawah, kebun, bangunan, emas, dan lain-lain.

- c. Pendapatan yang diperoleh dari pembayaran tunjangan pemerintah
 Pembayaran tunjangan adalah pembayaran yang diberikan oleh Pemerintah kepada orang-orang yang kurang mampu seperti fakir miskin, kaum duafa, dst Pembayaran seperti ini dapat berupa subsidi, BLT (bantuan langsung tunai), BOS (bantuan operasional sekolah), dan lain-lain. Dengan demikian pembayaran tunjangan dapat mengurangi jumlah ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan.

Tabel 8. Kontribusi Pendapatan Rumah Tangga Petani Menurut Luasan Lahan

Jenis Pendapatan	Rata-rata Responden Rp	Rata-rata Responden %
Pertanian		
Usaha tani Padi	15.705.000	64,78
Usaha tani Non-Padi		
Berternak	645.000	2,66
Berkebun sayur dan buah	232.400	0,96
Non Pertanian:		
Ojek	250.000	
Buruh Bangunan	156.000	1,04
Buruh Pabrik	6.500.000	0,64
Wirausaha/ Pedagang	755.000	26,81 3,11
Total	24.243.400	100

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendapatan petani yang menjadi responden dalam penelitian ini berasal dari usaha tani mereka yaitu sebesar 64,78%, kemudian rendahnya presentase pendapatan yang diperoleh dari sektor non pertanian yang hanya 26,81% untuk Buruh Pabrik, 3,11% untuk Wirausaha/ Pedagang, 1,04% untuk Ojek dan 0,64% untuk buruh bangunan disebabkan karena para petani hanya melaksanakan pekerjaan non sektor pertanian pada waktu senggang yaitu saat tidak sedang mengelola usaha tani atau sedang menunggu hasil panen. Namun ketika keluarga petani padi hanya bergantung pada pendapatan dari usahatani padi saja, maka keluarga petani perlu mengatur pengelolaan keuangannya dengan baik, apabila pengelolaan keuangannya kurang baik, maka keluarga petani

padi tidak akan mampu untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, sehingga perlu mengoptimalkan waktu senggangnya yaitu pada saat tidak sedang mengelola usaha tani atau sedang menunggu hasil panen.

4. Struktur Pengeluaran Rumah Tangga Petani

Pengeluaran makanan yang dianalisis dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi sumber karbohidrat, daging, telur, kacang-kacangan, sayur, buah, gula, teh/ kopi, rokok, dan lain-lain. Komponen pengeluaran untuk non makanan yang dianalisis dalam penelitian ini dikelompokkan kedalam beberapa komponen yaitu pupuk, obat tanaman, kesehatan, pendidikan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan, kebutuhan sosial, komunikasi, bahan bakar dan kebutuhan bukan makan lainnya.

Tabel 9. Kontribusi Pengeluaran Rumah Tangga Petani Padi Menurut Luasan Lahan

Jenis Pengeluaran	Rata-rata Responden (Rp)	Rata-rata Responden (%)
Pengeluaran makan	9.725.500	54,4
Pengeluaran non-makan	8.152.600	45,6
Total (%)	17.878.100	100

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengeluaran non makanan hampir sama jumlahnya dengan pengeluaran makanan yaitu 54,4% untuk makanan dan 45,6% untuk non makanan, hal ini menunjukkan para petani yang menjadi responden dalam penelitian ini masih sebatas pemenuhan kebutuhan primer dan sekundernya hampir mendekati kebutuhan primernya, hal tersebut bisa dikategorikan keluarga tani dalam penelitian ini berada pada golongan menengah. Kemudian naiknya kebutuhan non makanan dalam penelitian ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu masa pandemi yang terjadi, penghapusan subsidi untuk beberapa kebutuhan non makanan, inflasi, perbedaan luas lahan dimana Semakin luas pemilikan lahan petani, semakin besar juga pengeluaran petani untuk non-makan. Kemudian Biasanya makin tinggi tingkat pendapatan, tingkat konsumsi rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi makin besar.

5. Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani

Analisis Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani (NTPRP) merupakan analisis untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Semakin besar nilai NTPRP tingkat kesejahteraan petani semakin tinggi. Nilai NTPRP <1 menunjukkan bahwa total pengeluaran rumah tangga petani lebih besar dibandingkan dengan total pendapatan rumah tangga petani. Artinya, petani

belum mampu memenuhi kebutuhan untuk usaha pertanian dan non pertanian.

Tabel 10. Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani (NTPRP) Berdasarkan Pengeluaran

NTPRP	NTPRP Responden
Min	0,46
Max	6,71
Rata-rata	1,37

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani (NTPRP) untuk nilai dari responden yang minimum berada pada nilai 0,46, hal tersebut menunjukkan bahwa total pengeluaran rumah tangga petani/ responden tersebut lebih besar dibandingkan dengan total pendapatan rumah tangganya, hal tersebut juga menjelaskan petani/ responden tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan untuk usaha pertanian dan non pertaniannya. Kemudian Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani (NTPRP) yang maksimum berada pada nilai 6,71, hal tersebut menunjukkan bahwa total pengeluaran rumah tangga petani/ responden tersebut lebih kecil dibandingkan dengan total pendapatan rumah tangganya, hal tersebut juga menjelaskan petani/ responden tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan untuk usaha pertanian dan non pertaniannya. Namun secara rata-rata Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani (NTPRP)nya berada pada nilai 1,37, menunjukkan $NTPRP > 1$ berarti secara rata-rata petani/ responden sudah mampu memenuhi kebutuhan untuk usaha pertanian dan non pertaniannya. Namun yang perlu dipahami adalah masih banyak usaha petani hanya atau peluang bisnisnya pada tingkatan hulu saja dan penyaluran atau penjualan hasil padi nya masih melalui pihak ketiga tanpa ada pengawasan, sehingga pendapatan petani masih kurang optimal. Padahal elastisitas harga beras bersifat inelastis dan bernilai negatif akibat adanya hubungan timbal balik sehingga beras termasuk kategori barang normal/ kebutuhan pokok. Hal ini dapat dijelaskan, meskipun harganya naik, orang akan tetap membutuhkan konsumsi beras sebagai makanan pokok. Karenanya, meskipun mungkin dapat dihemat penggunaannya, namun cenderung tidak akan sebesar kenaikan harga yang terjadi. Sebaliknya pula, jika harga beras turun konsumen tidak akan menambah konsumsinya sebesar penurunan harga. Ini karena konsumsi beras memiliki keterbatasan dalam hal ini sesuai dengan kebutuhan si konsumen, misalnya karena kenyang.

Oleh sebab itu diperlukan adanya penyuluhan kepada beberapa petani dan kelompok tani untuk mengoptimalkan pendapatannya dari usaha tani

agar peluang bisnisnya mulai dari tingkatan hulu sampai dengan hilirnya. Karena apabila sektor pertanian dibangun dari hulu hingga hilir dalam suatu rantai nilai maka kontribusinya akan semakin meningkat.

6. Perkembangan Nilai Tukar Petani di Indonesia

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib), atau bisa dikatakan NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. NTP ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani. Nilai ini membandingkan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Adapun arti kata NTP, yaitu:

- 1) $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- 2) $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- 3) $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Bedasarkan penjelasan dari BPS, adapun manfaat dari mengetahui NTP ini, yaitu:

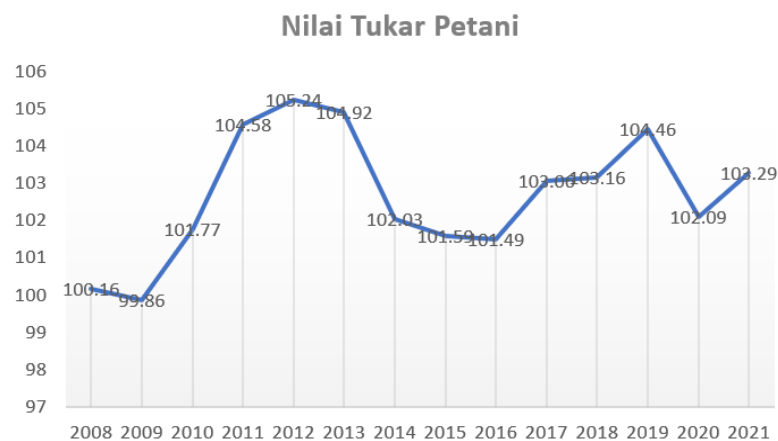
- 1) Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
- 2) Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.
- 3) NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.
- 4) Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

Tabel 11. Perkembangan Nilai Tukar Petani 2008- Maret 2021

Tahun	NTP
2008	100,16
2009	99,86
2010	101,77
2011	104,58
2012	105,24
2013	104,92
2014	102,03
2015	101,59
2016	101,49
2017	103,06
2018	103,16
2019	104,46
2020	102,09
2021	103,29

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2009 Nilai Tukar Petani (NTP) nya yaitu 99,86 berarti mengalami defisit karena < 100 , hal ini menunjukkan bahwa Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. Selanjutnya untuk lima tahun terakhir (2016-2020) nilai yaitu pada rentan 101, 49 - 104,46 yang menunjukkan NTP > 100 yang berarti petani mengalami surplus, dimana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Kemudian berdasarkan data dari BPS NTP nasional pada Maret 2021 bernilai 103,29 hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan pada maret 2020 yaitu 102, 09. Sebagaimana bisa kita lihat pada gambar grafik di bawah ini:



Gambar 2. Perkembangan Nilai Tukar Petani 2008- Maret 2021

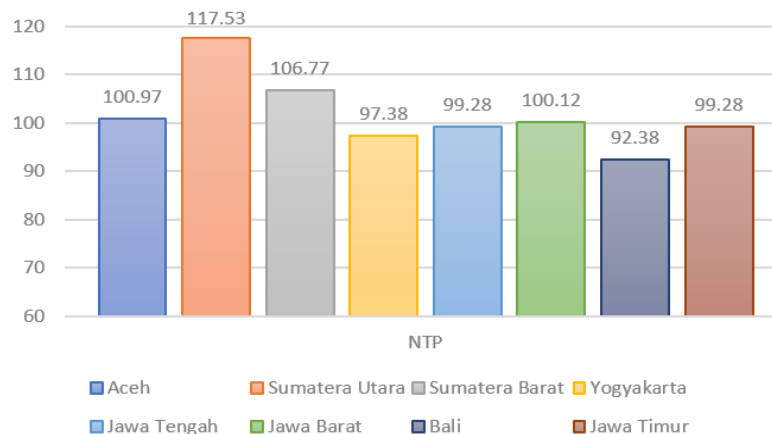
Adapun berdasarkan data dari Badan Pusat Staistik Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan nilai tukar petani di 8 provinsi yang menjadi objek dalam penelitian yang dilakukan oleh peniti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Perkembangan Nilai Tukar Petani 8 Provinsi per Juli 2021

No	Provinsi	NTP	Keterangan
1	Aceh	100,97	Surplus
2	Sumatera Utara	117,53	Surplus
3	Sumatera Barat	106,77	Surplus
4	Yogyakarta	97,38	Defisit
5	Jawa Tengah	99,28	Defisit
6	Jawa Barat	100,12	Surplus
7	Bali	92,38	Defisit
8	Jawa Timur	99,28	Defisit

Sumber: BPS

Berdasarkan data pada tabel di atas diantara 8 provinsi yang menjadi objek dalam penelitian ini menunjukkan terdapat 4 provinsi yang NTP nya surplus yaitu provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, hal ini menunjukkan bahwa keempat provinsi yang mendapat NTP yang surplus menjelaskan bahwa harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, serta pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Sedangkan 4 provinsi lainnya memperoleh NTP yang defisit yaitu provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya, serta pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. Namun secara nominal NTP tertinggi berada di provinsi Sumatera Utara dengan nilai 117,53 dan terendah ada pada provinsi Bali diantara 8 provinsi yang menjadi objek dalam penelitian ini dengan nilai 92,38. Namun apabila kita rata-ratakan NTP pada 8 provinsi tersebut maka rata-rata NTP nya yaitu 101,71. Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 5. Perkembangan Nilai Tukar Petani 8 Provinsi per Juli 2021

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan, yaitu Tingkat pendapatan petani yang menjadi responden dalam penelitian ini berasal dari usaha tani mereka yaitu sebesar 64,78%, kemudian rendahnya presentase pendapatan yang diperoleh dari sektor non pertanian yang hanya 26,81% untuk Buruh Pabrik, 3,11% untuk Wirausaha/ Pedagang, 1,04% untuk Ojek dan 0,64% untuk buruh bangunan disebabkan karena para petani hanya melaksanakan pekerjaan non sektor pertanian pada waktu senggang yaitu saat tidak sedang mengelola usaha tani atau sedang menunggu hasil panen. Namun ketika keluarga petani padi hanya bergantung pada pendapatan dari usahatani padi saja, maka keluarga petani perlu mengatur pengelolaan keuangannya dengan baik, apabila pengelolaan keuangannya kurang baik, maka keluarga petani padi tidak akan mampu untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, sehingga perlu mengoptimalkan waktu senggangnya yaitu pada saat tidak sedang mengelola usaha tani atau sedang menunggu hasil panen. Sedangkan pengeluaran non makanan hampir sama jumlahnya dengan pengeluaran makanan yaitu 54,4% untuk makanan dan 45,6% untuk non makanan, hal ini menunjukkan para petani yang menjadi responden dalam penelitian ini masih sebatas pemenuhan kebutuhan primer dan sekundernya hampir mendekati kebutuhan primernya, hal tersebut bisa dikategorikan keluarga tani dalam penelitian ini berada pada golongan menengah. Maka erdapat 6 poin dalam menjelaskan kesejahteraan dalam Islam yaitu 1). Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara, 2). Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil, 3). Penggunaan

berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir, 4). Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata, 5). Menjamin kebebasan individu, 6). Kesamaan hak dan peluang, dan 7). Kerjasama dan keadilan.

SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, Perlu adanya peningkatan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran petani dalam memenuhi strategi pembangunan kesejahteraan petani. Kedua, Perlu mengoptimalkan waktu senggang petani yaitu pada saat tidak sedang mengelola usaha tani atau sedang menunggu hasil panen. Dan ketiga, Perlunya pengoptimalan literasi dari pemerintah untuk mengedukasi petani agar bisa menjalankan usaha taninya dengan melihat peluang bisnisnya mulai dari tingkatan hulu sampai dengan hilirnya. melalui pemaksimalan kelompok tani. Dengan menerapkan kebijakan yang sesuai, diharapkan dapat tercapai peningkatan kesejahteraan petani serta kemajuan sektor pertanian secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Barahima, et al. *Agricultural Systems in Ecosystem Perspective*. Manokwari: Unipa Postgraduate Program, 2019.
- Ahmadi, Ruslan. *Qualitative Research Methodology*. Yogyakarta: Ar-Ruszz Media, 2014.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Al-Fiqh AI-Iqtishadi Li Amiril the believer Umar Ibn Al-Khaththab*. translated by Asmuni Solihan Zamalchsyari: Economic Jurisprudence Umar bin AI-Kathab. Jakarta: Khalifa, 2006.
- Anggi, Muhammad Yusri, <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/article/69940/VARIETAS-PADI/>, Rice Varieties, Downloaded July 26, 2021.
- Boediono. *Economic Growth Theory*. Yogyakarta, BPFE UGM, 1992.
- BPS, People's Welfare Indicator 2020, <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/5d97da0e92542a75d3cace48/indikator-kesejahteraan-rakyat-2020.html>, Downloaded 13 August 2021
- BPS. *Farmer's Exchange Rate*. Jakarta: BPS Indonesia, 2020.
- BPS. *Statistics Indonesia 2018*. Jakarta: BPS Indonesia, 2018.
- Case and Fair. *Principles of Microeconomics fifth edition*. Jakarta: Prenhallindo, 2002.
- Halal Time, *What Is the Importance of Halal Income in Islam?*, <https://www.halaltimes.com/what-is-the-importance-of-halal-income-in-islam/>, 2022.
- Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. *Al-Quran Translation*. Bandung: Darus Sunnah, 2015.

- Karim, Adiwarmarman Azwar. *History of Islamic Economic Thought*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kata Data, Indonesia Has a Raw Rice Field Area of 7.46 million hectares, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/05/indonesia-miliki-wide-baku-sawah-746-juta-hectare>, Downloaded July 26, 2021.
- Pawit, M Yusuf. *Guidelines for the Implementation of School Libraries*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Rachmat, Muchjidin. *Farmers' Terms of Trade: The Concept, Estimation, and Relevance for Farmers' Welfare Indicators*. Bogor: Center for Socio-Economic and Agricultural Policy, 2013.
- Said, Muhammad. *Introduction to Islamic Economics*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Seal and Bruzy. *Definition of social welfare*. Jakarta: _____, 1998.
- Simatupang, Pantjar, et al. *Review and Formulation of Farmers Welfare Indicators*, Bogor: Ministry of Agriculture, 2016
- Sugiono. *Educational Research Methods with Quantitative, Qualitative, and R&D Approaches*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Tarigan, Azhari Akmal. (2019). *Tafsir Ayat-Ayat*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Umar, Husein. *Research Design: HR and Employee Behavior*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Chapra, Umer. *The Future of Economics (An Islamic Overview)*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Winardi. *Economic Terms*. Bandung: Mandar Maju, 1996.